PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN PRINGSEWU

(Skripsi)

Oleh

MUHAMAD BASRI
1516041059

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2022

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

MUHAMAD BASRI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2022

ABSTRAK

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

MUHAMAD BASRI

Kepala desa hari ini pada kenyataannya bukan lagi sebagai perpanjangan tangan pemerintah supra desa, melainkan sudah menjadi tokoh yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan desa mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Hal tersebut menjadi nilai positif apabila kepala desa mampu untuk terus melakukan pembangunan sehingga menjadi desa mandiri sesuai dengan klasifikasi IDM. IDM sendiri merupakan instrumen untuk mengukur dan mengetahui status desa tertentu. Berdasarkan hasil rekapitulasi IDM tahun 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon bahwa Kabupaten Pringsewu tercatat hanya memilik 1 desa mandiri. Akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu 2019-2020 jumlah tersebut terus mengalami perubahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM di Kabupaten Pringsewu serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan tiga fokus utama yaitu peran Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM di Kabupaten Pringsewu sudah dilakukan dengan baik, mulai dari motivator, fasilitator, maupun mobilisator. Adapun faktor yang memengaruhi yaitu partisipasi masyarakat dan ketersediaan fasilitas umum yang dapat diakses masyarakat.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, IDM, Kepemimpinan.

ABSTRACT

THE LEADERSHIP ROLE OF THE VILLAGE CHIEF IN IMPROVEMENT OF VILLAGE BUILDING INDEX IN PRINGSEWU REGENCY

By

MUHAMAD BASRI

Today's village head is in fact no longer an extension of the supra-village government, but has become a figure in charge of the course of village government from planning to evaluation. This is a positive value if the village head is able to continue to develop so that it becomes an independent village in accordance with the IDM classification. IDM itself is an instrument to measure and find out the status of a particular village. Based on the results of the 2018 IDM recapitulation from the Community Empowerment Office and Pekon, Pringsewu Regency is recorded to have only 1 independent village. However, in the following year, namely 2019-2020, the number continues to change.

This study aims to determine the leadership role of village heads in improving IDM in Pringsewu Regency and the factors that influence it. This type of research is descriptive with qualitative methods. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions with three main focuses, namely the role of Motivator, Facilitator, and Mobilizer.

The results showed that the leadership role of the village head in improving IDM in Pringsewu Regency has been carried out well, starting from motivators, facilitators, and mobilizers. The influencing factors are community participation and the availability of public facilities that can be accessed by the community.

Keywords: *The Role of Village Head, IDM, Leadership.*

Judul Skripsi	:	**PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN PRINGSEWU**
Nama Mahasiswa	:	**Muhamad Basri**
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**1516041059**
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Yulianto, M.S.
NIP 196107041988031005

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP 198406302015042002

2. Ketua Jurusan

Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP 197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yulianto, M.S.**

Sekretaris : **Ita Prihantika, S.Sos., M.A.**

Penguji : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian: **13 September 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 13 September 2022

Yang Menyatakan

Muhamad Basri
NPM 1516041059

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 25 Desember 1996 di Desa Kesumadadi, Kec. Bekri, Kab. Lampung Tengah dengan nama lengkap Muhamad Basri yang merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Bapak Bejo Riyanto dan Ibu Sunarti. Penulis memulai pendidikan dari taman kanak-kanak di TK PKK Tunas Pertiwi Kesumadadi tahun 2002-2003, Sekolah Dasar (SD) di SD N 1 Kesumadadi tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama di MTs Guppi 1 Kesumadadi Tahun 2009-2012, dan menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Kesuma Bhakti 2012-2015. Kemudian melanjutkan studi Strata Satu (S1) melalui jalur Beasiswa PMPAP tahun 2015 pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Lampung. Semasa menjadi mahasiswa, penulis aktif bergiat di pelbagai organisasi yang diantaranya Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik (LAB-AKP), FISIP-UNILA, PMII Komisariat Unila, Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara).

MOTTO

Kuncinya Ada Pada Diri Sendiri
(M. Basri)

Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak pertumpahan darah
(Gus Dur)

Are leaders born or made? This is a false dichotomy -leaders are neither born nor made. Leaders choose to be leaders.
(Stephen R. Covey)

Carry a candle in the dark, be a candle in the dark, know that you're a flame in the dark.
(Ivan Illich)

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.
(Pramoedya Ananta Toer)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah S.W.T.
Sholawat Kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarganya.

Aku Persembahkan Karya ini untuk:

ORANG TUAKU

Bapak Bejo Riyanto dan Ibu Sunarti. Terima kasih pak bu atas doa dan perjuangnnya. Engkau adalah mutiara hidupku.

MBAK-MBAKKU TERSAYANG

Istiqomah dan Sulis Tia Ningsih. Terima kasih telah menjadi teman untuk bertukar pikiran, berbagi cerita dan selalu memotivasi.

KELUARGA BESARKU

Terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan

ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah S.W.T. atas karunianya, serta berkat doa dan restu dari orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN PRINGSEWU"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N.) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yulianto, M.S., selaku dosen Pembimbing Utama. Terima kasih untuk ilmu, saran, waktu, nasehat, bimbingan serta kebaikan hati yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku dosen Pembimbing Pembantu dalam penelitian ini. Terima kasih telah menjadi pembimbing yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., sebagai dosen Penguji. Terima kasih selama ini sudah menjadi ibu yang baik di kampus.
4. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., terima kasih sudah menjadi dosen Pembimbing Akademik yang mau mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan arahan dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Terima kasih bu.
6. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Mbak Wulan dan Pak Jo. Terima kasih sudah memberikan pelayanan yang baik dan kelancaran administrasi kepada penulis sampai penyelesaian skripsi ini.

7. Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.
9. Seluruh Bapak/ Ibu karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
10. Segenap informan dalam penelitian ini yaitu Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu Bapak Sugiyanto (Pj. Kepala Dinas PMP), Bapak Tri Haryono (Kabid Pembangunan dan Pengembangan Pekon). Pejabat Pekon Sekabupaten Pringsewu Bapak Dedi Sutrisno (Kakon Adiluwih), Bapak Purwoko (Kakon Sukoharjo III), Bapak Syayidil Ghofur, S.Pd. (Kakon Margosari), Bapak Rasmin (Kakon Podosari), Bapak Azhari. Z.N. (Kakon Sukaratu) beserta sekretaris pekon, BHP, dan masyarakat yang saya banggakan.
11. Sahabat-sahabat dan para senior PMII Komisariat Universitas Lampung. Terima kasih atas segala pengalamannya dalam berorganisasi.
12. Teman-teman ANE 15 (ATLANTIK) secara umum. Terima kasih atas segala kebersamaan dan dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita sukses semua. Aamiin.
13. Teman kost dan teman susah Sandy Irvanda, Pandu Julian Syahputra, dan Dedi Sonata. Kakak tingkat Hiro Isman, Satria Adi Pradana, Andryanto, semoga sukses. Aamiin.
14. Masyarakat Pekon Guring, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus. Terima kasih sudah memberikan sambutan dan kesan yang baik selama KKN di sana.
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan kenangan, ilmu, teman, serta sahabat.
16. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Semoga Allah S.W.T. memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada

kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap karya ini dapat berguna dan bermanfaat. Aamiin.

Bandarlampung, 13 September 2022

Penulis

Muhamad Basri

DAFTAR ISI

Halaman

PERSEMBAHAN ..... **i**

PRAKATA ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

I. PENDAHULUAN **1**
- **1.1. Latar Belakang** 1
- **1.2. Rumusan Masalah** 6
- **1.3. Tujuan Penelitian** 6
- **1.4. Manfaat Penelitian** 6

II. TINJAUAN PUSTAKA **7**
- **2.1. Tinjauan Tentang Peran** 7
  - **2.1.1. Definisi Peran** 7
  - 2.1.2. Teori Peran 8
- **2.2. Tinjauan Tentang Kepemimpinan** 9
  - **2.2.1. Definisi Kepemimpinan** 9
  - **2.2.2. Teori Kepemimpinan** 10
  - **2.2.3. Fungsi Kepemimpinan** 13
  - **2.2.4. Ciri-ciri Pemimpin yang Efektif** 14
- **2.3. Tinjauan Tentang Desa** 15
- **2.4. Tinjauan Tentang Kepala Desa** 16
  - **2.4.1. Definisi Kepala Desa** 16
  - **2.4.2. Wewenang Kepala Desa** 17
  - **2.4.3. Hak Kepala Desa** 18
  - **2.4.4. Kewajiban Kepala Desa** 18
- **2.5. Tinjauan Tentang Peran Kepala Desa** 19
- **2.6. Tinjauan Tentang IDM** 20
- **2.7. Penelitian Terdahulu** 22
- **2.8. Kerangka Berpikir Penelitian** 24

III. METODE PENELITIAN **27**
- **3.1. Jenis Penelitian** 27

3.2. Fokus Penelitian 28
3.3. Lokasi Penelitian 29
3.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 30
3.4.1. Jenis Data 30
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data 31
3.5. Teknik Analisis Data 34
3.6. Teknik Keabsahan Data 35

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN **38**
4.1. Gambaran Umum IDM Di Kabupaten Pringsewu 38
4.1.1. Gambaran Umum Pekon Adiluwih 42
4.1.2. Gambaran Umum Pekon Sukoharjo III 44
4.1.3. Gambaran Umum Pekon Margosari 45
4.1.4. Gambaran Umum Pekon Podosari 47
4.1.5. Gambaran Umum Pekon Sukaratu 48
4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian 50
4.3. Peran Kepala Desa dalam Peningkatan IDM 51
4.3.1. Peran Kepala Desa sebagai Motivator 51
4.3.2. Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator 65
4.3.3. Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator 78
4.4. Faktor-faktor yang memengaruhi Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan IDM 91

V. KESIMPULAN DAN SARAN **92**
5.1. Kesimpulan 92
5.2. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA **95**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi IDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 3
Tabel 2. Hasil Rekapitulasi IDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 3
Tabel 3. Hasil Rekapitulasi IDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 4
Tabel 4. Klasifikasi Desa Berdasarkan IKS, IKE, dan IKL 22
Tabel 5. Lokasi Penelitian 29
Tabel 6. Daftar Informan Penelitian 31
Tabel 7. Observasi Penelitian 33
Tabel 8. Hasil Rekapitulasi IDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 38
Tabel 9. Hasil Rekapitulasi IDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 39
Tabel 10. Hasil Rekapitulasi IDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 40
Tabel 11. Nama Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan 41
Tabel 12. Aparatur Pemerintah Pekon Adiluwih 43
Tabel 13. Aparatur Pemerintah Pekon Sukoharjo III 45
Tabel 14. Aparatur Pemerintah Pekon Margosari 46
Tabel 15. Aparatur Pemerintah Pekon Podosari 48
Tabel 16. Aparatur Pemerintah Pekon Sukaratu 49
Tabel 17. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan IDM 89

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian 26

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Subyektifikasi desa dalam bentuk regulasi yang dilakukan oleh pemerintah sejak era orde baru sampai hari ini telah mengalami sebanyak tiga kali pergantian Undang-undang (UU), yaitu UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/2005 tentang Desa, dan terakhir UU No. 6/2014 tentang Desa. Desa-desa dalam UU No. 5/1979 hanya berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dan tidak dinyatakan dapat "mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri" dengan kata lain tidak otonom. Karena tidak otonom, desa kemudian tidak lebih dari sekedar ranting patah yang dipaksakan tumbuh pada ladang pembangunan yang direncanakan rezim orde baru, sehingga menempatkan kepala desa bukan pemimpin masyarakat desa, melainkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah supra desa, yang digunakan untuk mengendalikan penduduk dan tanah desa.

UU No. 6/2014 tentang Desa yang merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau disebut dengan nama lain yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. UU ini juga mengonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Adapun di pasal 19 kewenangan desa meliput: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melalui Kemeterian Desa menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permen Desa, PDTT) No. 2/2016) tentang Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrumen pendukung terhadap UU Desa untuk mengetahui perkembangan desa sejak dianggarkannya dana desa tersebut. Permendesa ini mengklasifikasikan desa ke dalam lima status yaitu: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi 5 status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan (Hamidi dkk, 2015, h. 5).

Mengingat bahwa UU Desa saat ini menjadi patron dalam membangun kawasan pedesaan, secara implisit kemudian memberikan tanggung jawab yang besar kepada kepala desa (penguatan peran kepala desa) sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas musyawarah perencanaan pembangunan desa, menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Dengan begitu seorang kepala desa harus mampu mengelola dan mangoptimalkan dana desa sebagai sarana untuk meningkatkan status desa.

Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018[1] yang dilakukan oleh BPS Provinsi Lampung atau lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD)[2] yang mencakup wilayah setingkat desa terdiri dari 2.446 desa, 205 kelurahan dan 3 UPT/ SPT. Survei tersebut menunjukkan perbaikan status desa. Desa tertinggal berkurang sebesar 276 desa bila dibandingkan dengan tahun 2014. Untuk desa mandiri bertambah sebesar 72 desa. Kemudian hasil survei IDM yang dilakukan oleh Pendamping Desa (PD) tahun 2018 terhadap desa yang ada di sembilan kecamatan di Kabupaten Pringsewu terdapat satu desa mandiri dan lima desa maju,

---

[1] Pendataan Podes dilaksanakan tiga kali dalam 10 tahun. Podes 2018 dilaksanakan pada bulan Mei 2018 terhadap seluruh desa/nagari/kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/ Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), kecamatan, dan kabupaten/kota. Podes ini sudah dilakukan sebelum dikeluarkannya Permendesa nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Dan IDM efektif di implementasikan di seluruh Indonesia pada tahun 2018.

[2] Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa, dengan skala 0-100.

sisanya masuk kedalam klasifikasi desa berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Hasil suvei tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi IDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

No.	Kecamatan	STATUS DESA					
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Desa
1	Pardasuka	-	-	2	10	1	13
2	Ambarawa	-	-	3	5		8
3	Pagelaran	-	2	12	7	1	22
4	Pagelaran Utara	-	-	4	6	-	10
5	Pringsewu	-	-	5	5	-	10
6	Gadingrejo	-	-	19	4	-	23
7	Sukoharjo	-	1	12	3	-	16
8	Banyumas	-	1	5	5	-	11
9	Adiluwih	1	1	6	5	-	13
JUMLAH		**1**	**5**	**68**	**50**	**2**	**126**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon[3] Kabupaten Pringsewu Tahun 2018.

Tabel 1. menunjukkan bahwa di Kabupaten Pringsewu hanya terdapat 1 desa mandiri dan 5 desa maju. Sedangkan untuk desa dengan status berkembang berjumlah 68, desa tertinggal 50 dan 2 desa berstatus sangat tertinggal dari total 126 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Selanjutnya hasil rekapitulasi IDM tahun 2019 menunjukkan hasil yang berbeda yang dapat kita lihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi IDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2019

No.	Kecamatan	STATUS DESA					
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Desa
1	Pardasuka	-	-	5	8	-	13
2	Ambarawa	-	1	7	-	-	8
3	Pagelaran	-	4	18	-	-	22
4	Pagelaran Utara	-	-	7	3	-	10
5	Pringsewu	-	4	6	-	-	10
6	Gadingrejo	-	4	19	-	-	23
7	Sukoharjo	-	1	15	-	-	16

[3] Penyebutan desa dalam bahasa daerah Provinsi Lampung

No.	Kecamatan	STATUS DESA					
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Desa
8	Banyumas	-	2	9	-	-	11
9	Adiluwih	1	3	9	-	-	13
JUMLAH		**1**	**19**	**95**	**11**	**0**	**126**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu Tahun 2019.

Apabila melihat tabel 2 ini, maka akan terlihat adanya fluktuasi pada perkembangan desa dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dapat kita lihat bahwa fluktuasi tersebut terjadi pada jumlah desa yang berstatus maju dan berkembangan. Apabila pada tabel 1. Jumlah desa dengan status berkembang sebanyak 68, maka pada tebel 2. Mengalami kenaikan menjadi 95 desa. Kemudian desa dengan status tertinggal mengalami penurunan menjadi 11 desa dan desa yang berstatus sangat tertinggal menjadi nihil. Pengukuran IDM sendiri dilakukan setiap tahun dan disahkan setiap bulan april. Kemudian dari hasil pengukuran IDM terbaru 2020 ternyata juga menunjukkan hal berbeda dari tahun sebelumnya yaitu terdapat perubahan status desa. Adapun hasil rekapitulasi IDM tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Rekapitulasi IDM Kabupaten Pringsewu Tahun 2020

No.	Kecamatan	STATUS DESA					
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Desa
1	Pardasuka	-	-	13	-	-	13
2	Ambarawa	-	1	7	-	-	8
3	Pagelaran	1	4	17	-	-	22
4	Pagelaran Utara	-	1	9	-	-	10
5	Pringsewu	1	4	5	-	-	10
6	Gadingrejo	-	12	11	-	-	23
7	Sukoharjo	-	3	13	-	-	16
8	Banyumas	-	7	4	-	-	11
9	Adiluwih	1	5	7	-	-	13
JUMLAH		**3**	**37**	**86**	**0**	**0**	**126**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu Tahun 2020.

Tabel 3. tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Jumlah desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal berkurang dan naik menjadi desa berkembang. Hal tersebut juga diikuti oleh desa berstatus berkembang yang naik menjadi desa maju. Pencapaian tersebut tidak lepas dari seorang tokoh pemimpin yang menjadi motor penggerak guna memberikan dorongan kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun desa. Pentingnya peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Wayan Mahayana (2013, h. 413) menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa salah satunya dipengaruhi oleh peran kepala desa, dengan demikian maka perannya kepala desa menjadi penting yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan desa guna untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa peran kepemimpinan kepala desa penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan bersama.

Bintoro Tjokroamidjojo, (2000, h. 42) dalam bukunya menyebutkan bahwa kepala desa memiliki tiga peran utama yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator. Tiga peran tersebut selanjutnya diejawantahkan menjadi gerak kepala desa untuk memicu keterlibatan masyarakat dalam mencapai tujuan, memfasilitasi masyarakat agar memperoleh pelayanan publik dengan mengusahakan sarana dan prasarana dapat hadir untuk diakses oleh masyarakat desa, serta menggerakkan masyarakat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Realitas yang menunjukkan bahwa adanya fluktuasi status IDM sesuai dengan tabel 1, 2, dan 3 tersebut tentu menjadi pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi sedangkan setiap desa sudah memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan UU, sehingga pada akhirnya menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang “Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Pringsewu.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatkan IDM?
b. Apa faktor pendukung peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatkan IDM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

a. Didapatkannya gambaran tentang peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM.
b. Diketahuinya faktor-faktor yang memengaruhi peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatkan IDM.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan Ilmu Administrasi Negara, terlebih kajian yang berkaitan dengan peran kepemimpinan kepala desa, serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

b. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi kepala desa yang ada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan di seluruh Indonesia pada umumnya berkaitan dengan peran kepemimpinan pada organisasi pemerintah utamanya desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Peran

2.1.1. Definisi Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga memengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial (Soekanto, 2017, h. 243).

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Peran didefinisikan dari masing-masing pakar diantaranya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran beprilaku. Fakta bahwa organisasi mengindetifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang

diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan (Rivai, 2003, h. 148).

Pendapat lain dari Poerwadarminta juga mengatakan definisi peran adalah suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari seorang pimpinan dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaannya, serta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Kemudian menurut Gunawan peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Hendrik, 2013, h. 460). Jadi, peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat menciptakan perubahan serta mewujudkan harapan kearah kemajuan meskipun tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.2. Teori Peran

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang 8angk harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi 8 angk dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianologikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi 8angk dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau 8angk tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Selain itu, Kahn dkk. Dalam Ahmad dan Taylor, (2009) juga mengenalkan teori peran pada literatur perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai

perilaku peran mereka. Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul 9angka pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya 9angka psi penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan. Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut. Setiap orang yang memegang kewenangan atas suatu peran akan membentuk harapan tersebut.

2.2. Tinjauan Tentang Kepemimpinan

2.2.1. Definisi Kepemimpinan

Pada suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Tidak mudah karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. Bawahan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pengabdian dan pertisipasinya kepada organisasi secara efektif dan efisien (Sutrisno, 2016, h. 213). Kepemimpinan mutlak diperlukan bila terjadi interaksi kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan organisasi. Hersey dan Blanchard menyebut kepemimpinan adalah proses memengaruhi aktifitas seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu (Pasolong, 2015, h. 5).

Secara luas para ahli mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu usaha dengan menggunakan teknik, cara, atau gaya yang digunakan pemimpin untuk memengaruhi pengikut atau bawahan dalam melakukan kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan (Hersey, 1995, h. 99; Rivai, 2003, h. 3; Yukl, 2015, h. 4; Terry, 2008, h. 152). Kartanto menyebutkan beberapa definisi mengenai kepemimpinan adalah sebagai berikut (Kartono, 2009, h. 11):

a. Bennis mengenai kepemimpinan berkata "*the process by which an agent induse a subordinate to behave in a desired manner*" (proses dengan mana seorang agen menyebabkan seorang bawahan bertingkah laku menurut satu cara tertentu).
b. Tead dalam bukunya *The Art of Leadership* menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diingkan.
c. R. Terry dalam bukunya *Principle of Management* berkata "kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi orang-orang yang mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok."
d. H. Hoyt dalam bukunya Aspect of Modern Public Administration menyatakan kepemimpinan adalah seni untuk memengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang.

Definisi-definisi dari para ahli tentang kepemimpinan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu carayang digunakan oleh seorang pemimpin untuk memengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Definisi kepemimpinan yang diungkapkan oleh para ahli tersebut merefleksikan asumsi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan sebuah proses pengaruh sosial yang memang sengaja dilakukan seseorang atas orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau birokrasi.

2.2.2. Teori Kepemimpinan

Teori kepemimpinan merupakan generalisasi dari perilaku pemimpin dan konsep kepemimpinannya dengan menitikberatkan pada latar belakang historis, sebab akibat munculnya kepemimpinan dan sifat-sifat utama kepemimpinan (Pasolong, 2015, h. 84).

a. Teori Sifat (*Trait Theory*)

   Teori sifat berasumsi bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin karena memiliki sifat-sifat sebagai pemimpin. namun pandangan teori ini juga tidak memungkiri bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan, tetapi dapat juga dicapai

melalui suatu pendidikan dan pengalaman (Pasolong, 2015, h. 88; Sutrisno, 2016, h. 226). Keith merumuskan empat sifat umum yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi yaitu 1) Kecerdasan, 2) Kedewasaan, 3) Motivasi diri dan dorongan prestasi dan 4). Sikap-sikap hubungan kemanusiaan (Rivai dan Mulyadi, 2011, h. 7-8; Thoha, 2011, h. 287-288).

b. Teori Kelompok

Dasar perkembanganya berakar pada psikologi sosial. Teori ini beranggapan agar kelompok dapat mencapai tujuan-tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Kepemimpinan yang ditekankan pada adanya suatu proses pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya ini, melibatkan pula konsep-konsep sosiologis tentang keinginan-keinginan mengembangkan peranan. Penelitian psikologi sosial dapat dipergunakan untuk mendukung konsep-konsep peranan dan pertukaran yang diterapkan dalam kepemimpinan (Sulistio dan Sulistiowati, 2015, h. 151; Thoha, 2011, h. 288-289).

c. Teori Situasional atau Kontingensi

Teori ini berasumsi bahwa kinerja suatu kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan kesesuaian antara situasi (*situational favorablenees*) fiedler mengatakan bahwa kepemimpinan yang berhasil, tergantung pada penerapan gaya pemimpin terhadap tuntutan situasi (Pasolong, 2015, h. 90). Teori situasi mencoba mengembangkan kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Dalam pandangan ini, hanya pemimpin yang mengetahui situasi dan kebutuhan organisasi yang dapat menjadi pemimpin yang efektif (Sutrisno, 2016, h. 228).

d. Teori Jalan Kecil-Tujuan (*Path-Goal Theory*)

Teori ini yang dalam pengembangannya modern Martin Evans dan Robert House secara terpisah telah menulis karangan dalam subyek yang sama. Secara pokok teori ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh

perilaku pemimpin terhadap motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan pekerjaan bawahannya (Thoha, 2011, h. 296; Pasolong, 2015, h. 91).

Pandangan lain dikemukakan oleh Earl Nightingale dan Whith Schult (1965) dalam Sudriamunawar (2006, h. 4) bahwa seorang pemimpin harus memiliki persyaratan-persyaratan, yakni (Pasolong, 2015, h. 12):

a. Kemandirian berhasrat memajukan diri sendiri (individualis).
b. Besar rasa ingin tahu dan cepat tertarik pada manusia dan benda-benda.
c. Multitrampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam.
d. Memiliki rasa humor, antusiasme tinggi, dan suka berkawan.
e. Perfeksioinis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna.
f. Mudah menyesuaikan diri, kemam-puan adaptasi yang tinggi.
g. Sabar dalam menjalankan tugas.
h. Waspada, peka, jujur, optimis, berani, gigih, ulet, dan realistis.
i. Komunikatif, pandai berbicara atau berpidato.
j. Berjiwa wiraswasta.
k. Sehat jasmaninya, dinamis, sanggup, dan suka menerima tugas yang berat serta berani mengambil resiko.
l. Tajam firasatnya, tajam dan adil pertimbangannya.
m. Berpengetahuan luas dan haus akan ilmu pengetahuan.
n. Memiliki motivasi tinggi dan menyadari target atau tujuan hidupnya yang ingin dicapai, dibimbing oleh ideal-isme tinggi.
o. Punya imajinasi tinggi, daya kombinasi, dan daya inovasi.

Dari berbagai persyaratan-persyaratan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki nilai lebih dibandingkan orang yang dipimpinnya. Dari segi keilmuan, memiliki pengetahuan yang tinggi dan luas. Dari segi praktis, memiliki pengalaman dalam memimpin, berprestasi, dan rekam jejak yang baik. Dari segi mental, memiliki moral, akhlak yang baik dan terpuji. Dari aspek sosial, seorang pemimpin harus memiliki kepekaan dan kepedulian sosial terhadap lingkungan dan sesamanya. Secara politik, memiliki dukungan dan tingkat penerimaan yang tinggi dari masyarakat.

2.2.3. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan sistuasi sosial dalam kehidupan kelompok/ organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan di luar situasi itu. fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antarindividu di dalam situasi sosial suatu kelompok/ organisasi (Rivai dan Mulyadi, 2011, h. 34). Secara operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok kepemimpinan yaitu:

a. Fungsi Instruksi

   Fungsi ini bersifat satu arah. Pemimpin sebagai komikantor merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah (Rivai dan Mulyadi, 2011, h. 34-35; Pasolong, 2015, h. 30-31).

b. Fungsi Konsultasi

   Fungsi konsultatif, pemimpin dapat menggunakan fungsi ini sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya (Rivai dan Mulyadi, 2011, h. 34-35; Pasolong, 2015, h. 30-31).

c. Fungsi Partipasi

   Fungsi partisipasi, dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai posisi masing-masing (Rivai dan Mulyadi, 2011, h. 34-35; Pasolong, 2015, h. 30-31).

d. Fungsi delegasi

   Pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa

persetujuan dari pimpinan (Rivai dan Mulyadi, 2011, h. 34-35; Pasolong, 2015, h. 30-31).

e. Fungsi Pengadilan

Kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal (Rivai dan Mulyadi, 2011, h. 34-35).

2.2.4. Ciri-ciri Pemimpin yang Efektif

Winardi mengungkapkan bahwa kualitas dan ciri-ciri pemimpin yang efektif dapat dikelompokkan dalam sebuah kerangka yang terdiri dari delapan buah kualifikasi dasar yaitu (Winardi, 2000, h. 96):

a. Menginspirasi kepercayaan pada orang-orang

Untuk menjadi seorang pemimpin, orang harus mendapatkan kepercayaan orang-orang yang akan dipimpinnya. Dalam menumbuhkan kepercayaan seorang pemimpin perlu memiliki sejumlah kualitas tertentu. Pemimpin harus memiliki pengetahuan kompeten tentang alat-alat teknis dan prosesdengan apa para pengikutnya bekerja sehingga dengan demikian ia dapat mengajarkan dan mengembangkan mereka dalam penggunaannya. Selain itu pemimpin juga harus memiliki reputasi untuk menepati janji. Ia harus menepati kata-katanya untuk menimbulkan kepercayaan.

b. Persistensi (Tekad Bulat) untuk mencapai tujuan

Seorang pemimpin harus percaya dan yakin 100% tentang apa yang ingin dicapai olehnya. Pemimpin harus memiliki persistensi dan kemauan untuk mencari metode-metode guna mencapai tujuan dengan metode yang paling tepat.

c. Kemampuan untuk berkomunikasi tanpa menimbulkan kesalahpahaman

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menerangkan tujuan yang akan dicapai kepada pihak lain dan membuatnya menjadi menarik. Hal ini penting untuk mengetahui kesulitan-kesulitan

komunikasi dan menjaga juga timbulnya kesalahan-kesalahan pada pihak yangmendengarnya.

d. Kesediaan untuk mendengar secara reseptif

Sifat ini seringkali membedakan seorang pemimpin dengan seorang komandan. Terdapat perbedaan antara mendengar dengan tertutup dan mendengar dengan keinginan jujur untuk mengerti dan menggunakan sudut pandangan orang lain sebaik-baiknya.

e. Perhatian jujur terhadap manusia

Seorang pemimpin harus memiliki perhatian jujur dalam kesejahteraan orang-orang di bawah kepemimpinannya. Perhatian macam itu tidak dapat dibuat-buat.

f. Memahami manusia dan reaksi mereka

Seorang pemimpin harus memahami manusia dan mengetahui mengapa mereka bertindak dengan cara tertentu. Seorang pemimpin harus mengerti bahwa apa yang dipikirkan seorang individu, apa yang dikatakan olehnya, dan apa yang dilakukannya merupakan suatu produk dari banyak kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya.

g. Objektivitas

Seorang pemimpin harus hati-hati dan bersikap objektif dan jangan membiarkan sentimen pihak lain mempengaruhi perasaan sendiri.

h. Kejujuran

i. Seorang pemimpin harus jujur, dia tidak dapat membiarkan orang-orang bertanya tentang apa yang sedang dipikirkannya.

2.3. Tinjauan Tentang Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat yang berada pada suatu wilayah dengan hak hukum yang sama dalam sistem pemerintahan nasional. Bab I pasal 1 angka 1 UU Desa memberikan definisi yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" (UU No. 6 tentang Desa, 2014).

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2002, h. 3). Pada hakekatnya desa merupakan entitas bangsa yang telah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui pengembangan paradigma dan konsep baru tata kelola desa secara nasional, berlandaskan prinsip keberagaman serta mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas, tidak lagi menempatkan Desa sebagai "latar belakang Indonesia", melainkan sebagai "halaman depan Indonesia" (Eko, 2015, h. vi).

2.4. Tinjauan Tentang Kepala Desa

2.4.1. Definisi Kepala Desa

Kepala desa adalah jabatan tertinggi dalam struktur pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah (Permendagri No. 83 tentang P. dan P. P. D., 2015, pasal 1, ayat 4). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU No. 6 tentang Desa, 2014, pasal 16, ayat 1).

Setiap kepala desa dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya untuk menjalankan pemerintahan desa dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan

undang-undang demi meningkatkan pembangunan pemerintah diwilayah desa. Pemerintah desa merupakan bagian tak terpisahkan dalam sistem pemerintahan nasional memiliki peran strategis dalam menjembatani antara kepentingan masyrakat dengan kepentingan pemerintah pusat yang utamanya berkaitan dengan pembangunan nasional. Melalui pemerintah desa, pembangunan atau program-program dari pemerintah yang selama ini bersifat dipaksakan atau populer dengan istilah *top-down* diharapkan mampu untuk merubahnya menjadi *buttom-up*.

2.4.2. Wewenang Kepala Desa

Guna mendukung kepala desa dalam menjalankan tugasnya, pada pasal 26 ayat 2 UU Desa menyebutkan kepala desa dalam melaksanakan memiliki wewenang:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa;
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3. Hak Kepala Desa

Lebih lanjut lagi, pada pasal 26 ayat 3 menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak:

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

2.4.4. Kewajiban Kepala Desa

Selanjutnya Pasal 26 ayat 3 Kepala desa berkewajiban yaitu:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi,korupsi, dan nepotisme;
g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
i. Mengelola keuangan dan aset desa;

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2.5. Tinjauan Tentang Peran Kepala Desa

Kepala desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksankan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pasal 26 ayat 1 UU Desa menyatakan kepala desa memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU No. 6 tentang Desa, 2014).

Tjokroamindjojo dalam *e-Journal* Syafitri dan Suriani Lilis (2019, h. 47) menyebutkan kepala desa memiliki tiga peran utama yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Koontz tentang pengertian motivasi yang dikutip oleh Hasibuan (1996:95) mengatakan bahwa motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk kebutuhan atau untuk mencapai suatu tujuan (Utami, 2011, h. 54). Motivasi bisa diberikan dari seorang individu kepada kelompok atau kelompok kepada individu ataupun dari kelompok ke kelompok. Motivasi diberikan pula oleh orang berkedudukan atau statusnya lebih tinggi dan berwibawa. Mereka memiliki unsur-unsur keteladanan dan panutan.

Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Lippit (1958) dan Rogers (1983) menyebutnya sebagai agen perubahan (change agent), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi(Soekanto, 2017, h. 213). Fasilitator bukanlah seorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan bimbingan nasehat, arahan atau pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan.

Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Kosier dalam Ngalim Purwanto (1998) mengatakan mobilisator adalah orang yang menggerakkan atau mengarahkan untuk melakukan sesuatu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan (Syam dan Ramlawati, 2017, h. 100). Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalanya melakukan gotong royong, siskamling, dan lain sebagainya. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD).

2.6. Tinjauan Tentang IDM

IDM adalah Indeks Komposit yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa (Permendesa PDTT No. 2 tentang IDM, 2016, pasal 1, angka 8). IDM meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat (Hamidi dkk. 2015).

Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup subdimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa-jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana (Permendesa PDTT No. 2 tentang IDM, 2016, h. 21-22).

IDM bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi. IDM sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa. Selain itu, IDM dapat digunakan sebagai database terkait penilaian kemajuan dan kemandirian desa. Selain itu, IDM berfungsi sebagai masukan bagi pemerintah dalam menentukan sasaran pembangunan nasional, serta menjadi input perumusan isu-isu strategis berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa (Permendesa PDTT No. 2 Tentang IDM, 2016, h. 20-21).

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM berdasarkan konsepsi bahwa desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang didalamnya aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Berikut adalah klasifikasi desa berdasarkan IDM.

Tabel 4. Klasifikasi Desa Berdasarkan IKS, IKE, dan IKL

No.	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat Tertinggal	≤ 0,4907
2	Tertinggal	≤ 0,5989 dan >0,5989
3	Berkembang	≤ 0,7072 dan >0,5989
4	Maju	≤ 0,8155dan >0,7072
5	Mandiri	> 0,8115

Sumber: Permendesa, PDTT No. 2/ 2016 tentang IDM.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya serta memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya yang Pertama Saleh dan Hariati (2016), dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros". Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini terdapat tiga deskripsi fokus yaitu motivator, faisilitator, dan mobilisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros berada dalam kategori baik, selaku pemerintah desa sudah menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai administrator pembangunan desa.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dalam hal fokus sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Akan tetapi berbeda dalam beberpa hal diantaranya peran yang ingin dilihat dan lokasi penelitianya. Penelitian tersebut di atas ingin melihat peran kepala desa sebagai administrator, sedangkan penelitian yang saya lakukan ingin melihat peran kepala desa dalam peningkatan IDM. Banyakanya lokasi penelitian juga berbeda, Saleh dan Hariati memilih hanya dilakukan di satu desa, sedangkan penelitian yang saya kerjakan dilakukan di lima desa.

Kedua, penelitian Wayan Mahayana (2013) yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur” juga membahas hal yang sama yaitu peran kepala desa dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori peran kepemimpinan yang sama yaitu motivator, fasilitator dan mobilisator. Penelitian tersebut menunjukkan Peran Kepala Desa dalam meningkatkan Pembangunan desa di Desa Bumi Rapak sudah berjalan baik. Kepala desa selaku pemerintah desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai kepala desa dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan atau program pembangunan desa yang sudah berjalan hingga saat ini. Kemudian dalam perannya sebagai motivator, fasilitator dan sebagai mobilisator dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak sudah cukup optimal. Di mana peran Kepala Desa selaku pemerintah desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Kepala Desa untuk memotivasi warga, memfasilitasi warga dalam kegiatan kegiatan pembangunan desa, serta menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan lainnya. Menggunakan teori peran kepemimpinan yang sama yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator. Penelitian tersebut ingin mengetahui peran seorang kepala desa dalam pembangunan. Hal tersebut berbeda dengan yang ada di penelitian saya yaitu ingin mengetahui bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM.

Ketiga, Arifin, M. Husni, dan Juli Weldisen (2017) dengan penelitiannya yaitu “Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Di Desa Pa’ Payak Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”. Metode yang digunakan adalah deskripsitf kualitatif. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Di Desa Pa’Payak Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan adalah Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator, Mediator dan sebagai Motivator dalam pembangunan fisik. Kepala Desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya hanya saja dalam melaksanakan perannya terdapat beberapa kendala sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya agar pembangunan yang ada di Desa Pa’Payak sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta peningkatan pembangunan yang selalu beorientasi kepada

kepentingan umum. Masih sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya di atas yang membedakan yaitu pada topik pembahasan yaitu antara pembangunan fisik dengan peningkatan IDM.

2.8. Kerangka Berpikir Penelitian

Pengaturan tentang desa sudah ada sejak masa pemerintahan orde baru. Pengaturan tentang desa bertujuan agar dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri atau otonom. Pemerintah melalui instrumen perundang-undangan telah beberapa kali menerbitkan peraturan perundang undangan yang melakukan pengaturan tentang desa, akan tetapi tidak memberikan dampak yang nyata terhadap perkembangan desa. Kemudian pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan UU No. 6 tentang Desa yang dilatarbelakangi oleh beberpa hal yaitu 1) Desa tidak memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri (tidak otonom); 2) Desa tidak jelas status dan kepastian hukum dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia; 3) Kepala desa bukan sebagai pemimpin masyarakat desa melainkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah supra desa; UU Desa juga memberikan pengakuan terhadap desa berdasarkan hak asal-usul yang artinya adalah sebagai bentuk pengakuan negara atas keberadaan desa yang selama ini diposisikan sebagai objek pembangunan. Pengakuan ini kemudian memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Selain itu pemerintah juga menerbitkan undang-undang tentang pemeringkatan status desa atau IDM yang bertujuan untuk menilai dan mengetahui status perkembangan desa sejak diterbitkannya kebijakan tersebut. IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Status perkambangan desa sendiri dipengaruhi oleh ketiga indeks tersebut yang memiliki klafikasi nilai yang sudah penulis paparkan pada bab ii[4]. Kabupaten Pringsewu yang tercatat sebagai kabupaten termuda di Provinsi Lampung sekaligus kabupaten dengan luas wilayah paling kecil. Berdasarkan data dari Dinas PMP Kabupaten Pringsewu

[4] Tinjauan tentang IDM, h. 20.

tentang IDM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi ststus desa yang cukup jelas. Pada tahun 2018 hanya memiliki 1 desa mandiri dan 5 desa maju. Kemudian tahun 2019 terjadi perubahan pada jumlah desa yang berstatus maju dan berkembangan. Di tahun 2020 sudah tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.

Lalu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sutrisno (2016, h. 213) mengungkapkan bahwasannya pada suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Tidak mudah karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. Bawahan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pengabdian dan pertisipasinya kepada organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya Bintoro Tjokroamidjojo (2000, h. 42) mengatakan bahwa terdapat tiga peran kepala desa yaitu, motivator, fasilitator, dan mobilisator. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yaitu menjadi desa mandiri. Paparan tersebut kemudian peneliti menganggap perlu dilakukannya sebuah penelitian mengenai peran kepemimpinan kepala desa sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan kepala desa yang ada di Kabupaten Pringsewu dalam peningkatan IDM serta untuk menganalisa faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM.

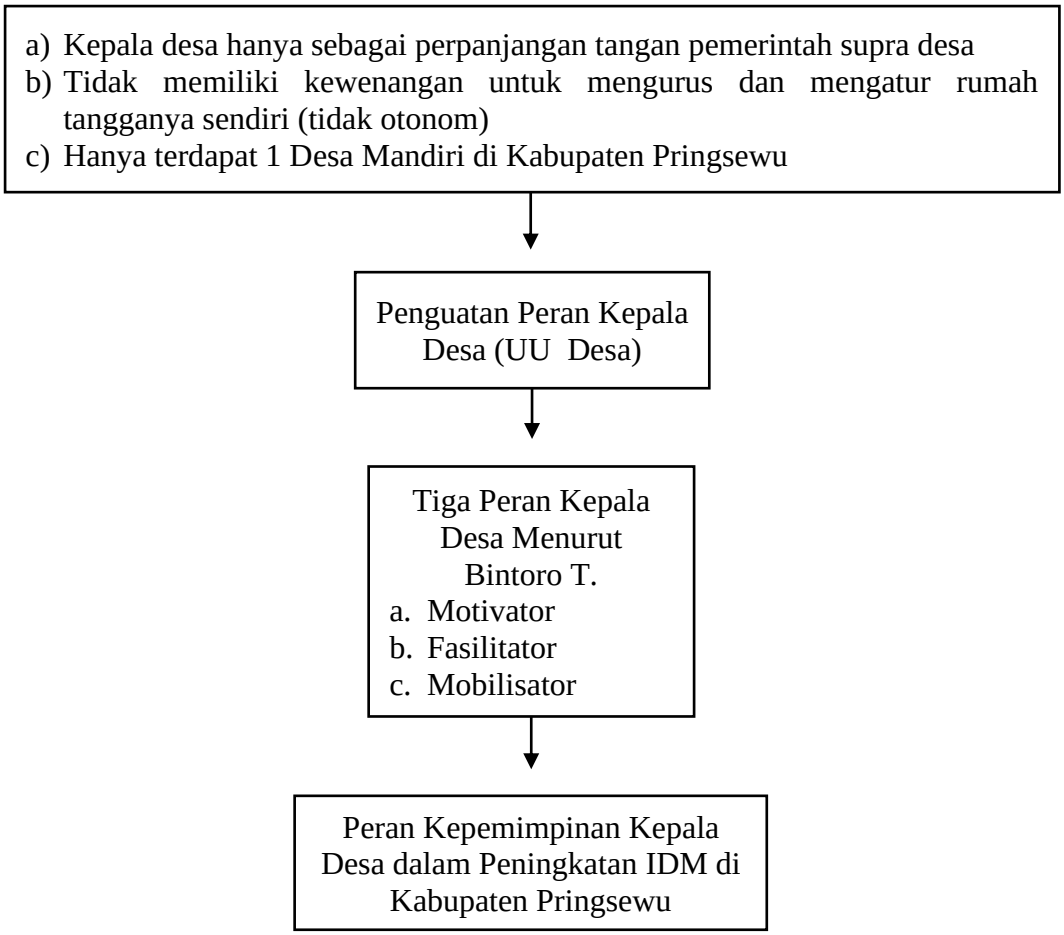

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2019.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel (Noor, 2012, h. 34-35). Metode kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017, h. 6).

Penggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena mengenai keseluruhan proses dari permasalahan yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh dan berusaha untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam proses tersebut. Tidak terlepas dari pokok permasalahan penelitian, maka peneliti menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM di Kabupaten Pringsewu.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk segala hal yang dijadikan sebagai pusat perhatian peneliti agar memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penetapan fokus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi, sehingga peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subyek penelitian, sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokusnya. Jadi peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan diambil dan data mana yang akan dibuang (Moleong, 2017, h. 94). Penelitian ini fokus pada tiga peran kepemimpinan kepala desa yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator (Tjokroamidjojo 2000, h. 42). Fokus dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Motivator

   Yaitu memberikan dorongan kepada masyarakat agar terpicu untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Fokus ini ingin melihat metode yang digunakan oleh kepala desa dalam memotivasi masyarakat agar ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa khusunya bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

b. Fasilitator

   Yaitu menyediakan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan desa secara bertanggung jawab sehingga memudahkan aktivitas yang berlangsung didalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan, sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan desa. Juga bertindak untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai penunjang dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa baik di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

c. Mobilisator

   Terakhir yaitu bagaimana kepala desa menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa. Peran mobilisasi ini meliputi proses penyampaian informasi kepada masyarakat yang kemudian menjadi gerakan nyata dalam bentuk

partisipasi pembangunan desa bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kepala desa sebagai perencana, penggerak, penanggungjawab, serta pelopor pembangunan yang sangat penting dalam mengadakan pendekatan untuk menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pembangunan yang telah direncanakan.

Terakhir penelitian ini juga ingin melihat faktor-faktor yang memengaruhi peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM di Kabupaten Pringsewu.

3.3. Lokasi Penelitian

Menentukan lokasi penelitian, cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian (Moleong, 2017, h. 86). Mengacu pada teori tersebut, maka selanjutnya menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pringsewu. Berikut adalah nama desa yang menjadi lokasi penelitian.

Tabel 5. Lokasi Penelitian

No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	Status IDM
1	Adiluwih	Adiluwih	Mandiri
2	Sukoharjo III	Sukoharjo	Maju
3	Margosari	Pagelaran Utara	Berkembang
4	Podosari	Pringsewu	Tertinggal
5	Sukaratu	Pagelaran	Sangat Tertinggal

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2019.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan banyak aspek. Pertama, rekomendasi dari Dinas PMP Kabupaten Pringsewu. Kedua, desa-desa tersebut memiliki status berdasarkan IDM tahun 2018 yang kemudian di tahun 2019 desa-desa tersebut mengalami perubahan status setelah dilakukan pemutakhiran. Ketiga, Kabupaten Pringsewu memiliki luas

wilayah 625 km^2 yang merupakan kabupaten terkecil apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Lampung. Jumlah kecamatannya yaitu 9 yang terdiri dari 126 desa dan 5 kelurahan sehingga berkorelasi pada waktu, biaya, dan tenaga yang dialokasikan untuk menyelesaikan penelitian ini.

3.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari dara primer ini tidak dapat langsung digunakan melainkan harus diolah terlebih dahulu. Sumber data primer ini langsung memberikan data kepada peneliti. Lofland mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakanselebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2017, h. 157). Data primer ini akan didapatkan oleh peneliti selama berada di lokasi penelitian yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi mengenai peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM di Kabupaten Pringsewu tahun 2018.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang didapatkan dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data yang diperoleh tidak perlu diolah lagi. Penelitian terdahulu menjadi acuan mengenai data yang perlu di kumpulkan kemudian data sekunder ini dapat disebut dengan data tambahan yang dalam penelitian ini data sekundernya yaitu IDM Kabupaten Pringsewu, visi-misi kepala desa, profil desa, profil kepala desa, dan RPJM Desa.

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik-teknik tersebut digunakan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Esterbeg menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Susan juga mengungkapkan bahwa dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2018, h. 231-232). Peneliti menentukan informan untuk di wawancarai dalam pengumpulan data yaitu denganmenggunakan teknik "*Purposive Sampling*" atau dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang informasi yang diharapkan, atau sebagai orang yang mengerti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara langsung dari narasumber utama atau informan yang menjadi kolega atau berkaitan dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawab kepala desa. Berikut adalah daftar informan penelitian:

Tabel 6. Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	Waktu
1	Sugiyanto	Pj. Kepala Dinas PMP Kabupaten Pringsewu	1 September 2020
2	Tri Haryono	Kepala Bidang Pembangunan Dan Pengembangan Pekon Dinas PMP Kabupaten Pringsewu	1 September 2020
3	Dedi Sutrisno	Kepala Desa Adiluwih	2 September 2020
4	Dasipo	Sekretaris Desa Adiluwih	2 September 2020
5	Kuminto	Ketua BPD Adiluwih	2 September 2020

No.	Informan	Keterangan	Waktu
6	Nur Cahyo	Warga Adiluwih	5 Juli 2022
7	Purwoko	Kepala Desa Sukoharjo III	2 September 2020
8	Edy Turyadi, S.Sos.	Sekretaris Desa Sukoharjo III	2 September 2020
9	Widodo	Ketua BPD Sukoharjo III	2 September 2020
10	Kurniadi	Warga Sukoharjo III	5 Juli 2022
11	Syayidil Ghofur, S.Pd.	Kepala Desa Margosari	3 September 2020
12	Apriyanto, SE.	Sekretaris Desa Margosari	3 September 2020
13	Sumarlan	Ketua BPD Margosari	3 September 2020
14	Triyono	Warga Margosari	6 Juli 2022
15	Rasmin	Kepala Desa Podosari	4 September 2020
16	Supono	Sekretaris Desa Podosari	4 September 2020
17	Drs. Windarto, MM.	Ketua BPD Podosari	4 September 2020
18	Panut	Warga Podosari	7 Juli 2022
19	Ashari. Z.N.	Kepala Desa Sukaratu	4 September 2020
20	Kusnan	Sekretaris Desa Sukaratu	4 September 2020
21	Sarpian	Ketua BPD Sukaratu	4 September 2020
22	Baharuddin	Warga Sukaratu	7 Juli 2022

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2020.

Selanjutnya peneliti menggunakan model wawancara semi-struktur Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dari wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2018, h. 233).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder yang memuat tentang informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti arsip desa, peraturan desa, serta foto-foto kegiatan. Dokumentasi tersebut

merupakan pelengkap yang berfungsi sebagai penguat penelitian yang berkaitan dengan peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan IDM. Adapun dokumen pada peneilitan ini ialah:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran IDM
4. Hasil Pemutakhiran IDM Kabupaten Pringsewu
5. Dokumen Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu Tahun 2018, 2019 dan 2020.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa
7. Monografi desa/ Profil desa
8. Stuktur Organisasi Desa serta
9. foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala desa.

c. Observasi

Observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara (Sugiyono, 2018, h. 228). Beberapa hal yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu aspek individu seorang kepala desa dalam memotivasi, memfasilitasi, serta memobilisasi sebagai berikut:

Tabel 7. Observasi Penelitian

No.	Aspek yang diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1	Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat	✓	

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2020.

3.5. Teknik Analisis Data

Bogdan mengatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain (Sugiyono, 2018, h. 244). Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2018, h. 247). Reduksi yang dilakukan yaitu diantaranya dengan merekap hasil wawancara dengan informan atau narasumber, mengumpulkan dan mengamati data hasil observasi desa sampel, serta pengamatan dokumen-domuken yang berkaitan dengan peran kepemimpinan kepala desa di Kabupaten Pringsewu.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyejian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan natar ketegori *flowchard* dan sejenisnya. Miles dan Haberman mengatakan yang artinya “paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif” (Sugiyono, 2018, h. 249). Pada penelitian ini, penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks naratif, tabel, serta gambar hasil observasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2018, h. 253). Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan berupa teks naratif yang mendeskripsikan tentangperan kepemimpinan kepala desa serta faktor-faktor pendukungnya dalam meningkatkan IDM.

3.6. Teknik Keabsahan Data

Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility). Moleong (2017, h. 327-332) mengatakan, Penjaminan keabsahan data melalui derajat kepercayaan data yang sesuai dengan penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik pemeriksaan data diantaranya:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah didek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak (Sugiyono, 2018, h. 270-271). Perpanjangan pengamatan dilakukan kerena masih belum cukupnya sumber data penelitian yaitu informan.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai sumber, cara, serta waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, dan hasil observasi serta

dokumentasi yang peneliti peroleh selama penelitian. Wawancara dilakukan dengan informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Kemudian untuk observasi peneliti melakukan pengamatan ke lokasi penelitian. Dan terakhir yaitu dokumentasi berupa IDM Kabupaten Pringsewu, Permendesa No. 6/ 2016 tentang IDM, profil desa, RPJM Desa, dan foto.

c. Kecukupan Referensi

Peneliti mengumpulkan referensi berupa rekaman hasil wawancara (transkrip) dengan informan, dokumentasi kegiatan kepala desa, IDM di Kabupaten Pringsewu, profil desa, data dan aset desa, peraturan desa, RPJM Desa, serta dokumentasi foto kegiatan kepala desa lainnya guna menjadi acuan dalam menganalisis data.

d. Pengujian Dependability

Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitynya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka peneliti tersebut tidak reliabel atau dependable. Untuk itu pengujian depenability dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2018, h. 277). Uji dependability ini dilakukan dengan cara audit oleh dosen pembimbing skripsi.

e. Pengujian Konfirmability

Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada (Sugiyono, 2018, h.

277). Pengujian ini dilakukan dengan cara ujian skripsi oleh tim penguji yang terdiri dari tiga orang dosen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan IDM di Kabupaten Pringsewu sudah dilakukan dengan baik. Peran kepala desa sebagai motivator dilakukan dengan cara melakukan tindakan-tindakan nyata. Akan tetapi masih terdapat warga yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan. selanjutnya peran fasilitator, secara umum tidak ada fasilitasi secara khusus yang diberikan oleh kepala desa kepada masyarakat. Kepala desa pada umunya menjadi fasilitator pada koridornya masing-masing. Terakhir yaitu peran sebagai mobilisator, peran ini sudah dilakukan dalam berbagai kegiatan pembangunan di desa. Peran mobilisasi dilakukan dengan memberikan instruksi kepada aparatur desa agar dapat disampaikan kepada warganya. Metode ini masif diterapkan di setiap desa karena dianggap efektif untuk memobilisasi masyarakat. Adapun faktor yang memengaruhi yaitu partisipasi masyarakat dan ketersediaan fasilitas umum yang dapat diakses masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan aparatur desa perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendekatan secara langsung serta memperbanyak pertemuan atau diskusi dengan masyarakat, sehingga diharapkan kedepannya masyarakat berperan aktif dan dapat diarahkan dalam rangka pembangunan desa.
2. Penelitian ini belumlah sempurna, saya rasa masih banyak yang perlu di kaji ulang. Maka saya berpandangan bahwa perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang urgensi peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan. Selain itu juga tentang korelasi antara dana desa terhadap status desa dalam IDM.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

BPS Kabupaten Pringsewu. 2019. *Kecamatan Adiluwih Dalam Angka 2019*. Kabupaten Pringsewu: CV. Jaya Wijaya.

Eko, Sutoro. 2015. *REGULASI BARU, DESA BARU: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT RI.

Hasibuan, Malayu S. P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Hersey, dan Blanchard. 1995. *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia.* ed. Alih Bahasa Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.

Kartono, K. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* Jakarta: Rajawali Pers.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015. *Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT RI.

Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cetakan Ke-5. Jakarta: Prenadamedia Group.

Pasolong, Harbani. 2015. *Kepemimpinan Birokrasi*. Cetakan Ke-4. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-27. Bandung: Alfabeta.

Sulistio, Eko Budi, dan Rahayu Sulistiowati. 2015. *Azas-azas Manajemen*. Bandarlampung: AURA Publishing.

Sumpeno, Wahyudin. 2009. *MENJADI FASILITATOR GENIUS: Kiat-kiat dalam Mendampingi Masyarakat*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutrisno, E. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group.

Thoha, M. 2011. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Cetakan Ke-21. Jakarta: Rajawali Pers.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Widjaja, HAW. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah: suatu telaah administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yukl, G. 2015. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Cetakan Ke-7. Jakarta: Indeks.

Zainal, V. R. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal, Veithzal R. & Dedy Mulyadi. 2011. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

Arifin, M.Z., M. Husni, dan Juli Weldison. 2017. "Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Pa'Payak Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara." *FISIPUBLIK : JURNAL ILMU SOSIAL DAN POLITIK* Vol. 1(No. 2): 69–75. https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik/article/view/17 (1 Oktober, 2019).

Atrika Dira. 2020. "Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru." UIN Sultan Syarif Kasim. http://repository.uin-suska.ac.id/30296/2/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf (13 Mei, 2022).

Hendrik, Okta. 2013. "Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau." *eJournal Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Mulawarman* Vol. 1(No. 2): 459–69. ejournal.ip.fisip-unmul.co.id (1 Oktober, 2019).

Kusuma Wardani, Yanuar, Yori Herwangi, dan Ahmad Sarwadi. 2018. "Peran Struktur Sosial Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: PLPBK Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta)." *Oktober* Vol. 44(No. 1): 1–20. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/215 (19 Juni, 2022).

Mahayana, W. 2013. “Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.” *eJournal Ilmu Pemerintahan* Vol. 1(No. 1): 400–414. ejournal.ip.fisip-unmul.org (1 Oktober, 2019).

Rudiah, Budi Setiawati, dan Susiani. 2018. “Peran Kepala Desa Sebagai Motivator dalam Meningkatkan Kinerja Aparat di Kantor Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.” *JAPB* Vol. 1(No. 2): 674–92. https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/149 (1 April, 2020).

Saleh, Sirajuddin, dan Hariati. 2016. “Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan Di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.” *Jurnal Office* Vol. 2(No. 2): 143–48. https://ojs.unm.ac.id/jo/article/view/2920 (1 Oktober, 2019).

Syafitri, Indrian, dan Suriani Lilis. 2019. “Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.” *e-Journal UIR (Universitas Islam Riau)* Vol. 5(No. 1): 44–54. https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/download/3606/1900 (1 Oktober, 2019).

Syam, Andi Bahrun, dan Ramlawati. 2017. “Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Menekan Angka Putus Sekolah Sekolah Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.” *Jurnal Ilmu Administrasita* Vol. 8(No. 2): 95–110. https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/administrasita/article/view/162. (30 Mei, 2022).

Utami, S. N. 2011. “Peran Kepala Desa Sebagai Motivator dalam Pembangunan Desa.” Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/23699/Peranan-Kepala-Desa-Sebagai-Motivator-Pembangunan-Desa (11 Mei, 2022).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menteri Dalam Negeri RI. 2015a. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 84 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.

———. 2015b. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. 2016. *Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 2 tentang Indeks Desa Membangun*.

Pemerintah Republik Indonesia. 1979. *Undang-undang Nomor 5 tentang*

Pemerintahan Desa.

———. 1999. *Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah*.

———. 2004. *Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah*.

———. 2005. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tentang Desa*.

———. 2008. *Undang-undang Nomor 48 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung*.

———. 2014. *Undang-undang Nomor 6 tentang Desa*.

LAINNYA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. 2018. *Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018*. Pringsewu.

———. 2019. *Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019*. Pringsewu.

———. 2020. *Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020*. Pringsewu.

Pemerintah Pekon Adiluwih. 2019. *RPJM Pekon Adiluwih*. Pringsewu.

Pemerintah Pekon Margosari. 2019. *RPJM Pekon Margosari*. Pagelaran.

Pemerintah Pekon Podosari. 2019. *RPJM Pekon Podosari*. Pringsewu.

Pemerintah Pekon Sukaratu. 2019. *RPJM Pekon Sukaratu*. Pagelaran Utara.

Pemerintah Pekon Sukoharjo III. 2019. *RPJM Pekon Sukoharjo III*. Sukoharjo.